

**ANALISIS KETAHANAN FISKAL
DAERAH INDONESIA
(Studi Kasus 1996, 2000 dan 2002)**

Skripsi



Disusun Oleh:

Ricky Maulana

99 313 026

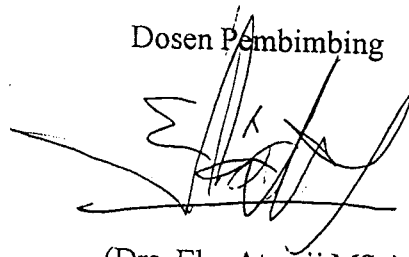
**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2004**

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, 19 Juni 2004

Telah Disetujui Dan Diterima Dengan Baik Oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eko Atmaji', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

(Drs. Eko Atmaji MSc)

KATA PENGANTAR



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillahirrabbi'l'alam, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT seru sekalian alam. Maha Raja seluruh makhluknya yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul :

“ANALISIS KETAHANAN FISKAL DAERAH DI INDONESIA”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada jurusan IESP di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis sadar bahwa kesemuanya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs.H. Suwarsono, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs Eko Atmadji, Mec selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dorongan serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Ayahhanda Tarmizi yang telah memberikan segalanya serta mendidik dengan ajaran dan keimanan kepada ALLAH SWT “Allah akan membantu orang yang selalu berusaha dan bertakwa kepadaNya”
4. Ibunda Elly Yulidar yang selalu aku sayangi dan telah mendidik dengan penuh kasih sayang penuh tanggung jawab serta selalu mendoakan dan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	III
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Hipotesis	6
1.6 Metode Penelitian	7
1.6.1 Daerah penelitian	7
1.6.2 Data Dan Sumber Data	7
1.6.3 Analisis Regresi	8
1.6.4 Uji Statistik	9
1.6.5 Uji Asumsi Klasik	10

1.7	Sistematika Penulisan	11
BAB II	LANDASAN TEORI	12
2.1	Telaah Pustaka.....	12
2.1.1	Hasil Penelitian Purnama	12
2.1.2	Hasil Penelitian Hari Prabtadi.	14
2.1.3	Hasil Penelitian Elia Radianto	14
2.2	Landasan Teori	15
2.2.1	Kebijakan Fiskal	16
2.2.2	Macam- Macam Kebijakan Fiskal	16
2.2.3	Fungsi Kebijakan Fiskal	17
2.2.4	Desentralisasi Fiskal Dan Perimbangan Keuangan Daerah	18
2.2.5	Posisi Fiskal	20
2.2.6	Ketergantungan Fiskal	21
2.3	Pendapatan Asli Daerah	22
2.3.1	Penyusunan APBD	25
2.3.2	Proses Penyusunan APBD	26
2.3.3	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Derajat Kemandirian Fiskal	26
BAB III	GAMBARAN UMUM PENELITIAN.	28
3.1	Keadaan Geografi	28
3.2	Penduduk	39

3.3	Ekonomi	31
BAB IV METODELOGI ANALISIS.....		36
4.1	Teori Regresi	36
4.1.1	Pengujian Hipotesis.....	36
4.1.2	Pengujian Asumsi Klasik.....	39
BAB V ANALISIS DATA		
5.1	Analisis Data	42
5.1.1	Analisis Hasil Estimasi	42
5.1.2	Koefisien Determinasi	43
5.1.3	Pengujian Secara Serempak	43
5.1.4	Pengujian Secara Parsial	44
5.2	Pengujian Asumsi Klasik	51
5.1.1	Uji Auto Korelasi	51
5.1.2	Uji Multikolonioritas	52
5.1.3	Uji Heterokedastisitas	53
5.3	Pembahasan Estimasi.....	54
BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....		57
6.1	Kesimpulan.....	57
6.2	Implikasi	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Propinsi Tahun 1996, 2000, 20002.....	30
3.2 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1996, 2000, dan 2002.....	31
3.3 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Pengeluaran Tahun 1996, 2000, dan 2002.....	33
3.4 laju Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Barang Kebutuhan Tahun 1996 2000, dan 2002.....	34
5.1 Hasil Estimasi.....	42
5.2 Uji F.....	44
5.3 Uji T.....	45
5.4 DW Statistik.....	52
5.5 Hasil Uji Multikolinioritas.....	52
5.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	53

DAFTAR GAMBAR

4.1 Uji T Pada Kurva Satu Sisi Positif	37
4.2 Kurva Distribusi F	38
5.1 Kurva uji T Variabel Jumlah Penduduk.....	45
5.2 Kurva uji T Variabel Luas Daerah.....	46
5.3 Kurva uji T Variabel Jumlah Penduduk Miskin.....	46
5.4 Kurva uji T Variabel PDRB.....	47
5.5 Kurva uji T Variabel Jumlah penduduk.....	47
5.6 Kurva uji T Variabel Luas Daerah.....	48
5.7 Kurva uji T Variabel Jumlah Penduduk Miskin.....	48
5.8 Kurva uji T Variabel PDRB.....	49
5.9 Kurva uji T Variabel Jumlah Penduduk.....	49
5.10 Kurva uji T Variabel Luas Daerah.....	50
5.11 Kurva uji T Variabel Jumlah Penduduk Miskin.....	50
5.12 Kurva uji T Variabel PDRB.....	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakekatnya ingin mencapai masyarakat adil dan makmur yang mereata material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat, dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis. Dalam upaya merealisasikan tujuan nasional tersebut, program pembangunan disusun atas dasar Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya guna menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia secara sederhana dibedakan dalam bentuk pembangunan sektoral merupakan realisasi dari perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional. Sedangkan pembangunan regional merupakan realisasi pembangunan sesuai dengan skala prioritas pembangunan pembangunan di tingkat daerah. Secara umum pembangunan merupakan suatu proses terencana dari situasi nasional yang lain. Dalam hal ini merupakan suatu konsep yang dinamis, selalu berubah sesuai dengan kondisi kerangka sistem sosial. Pemisahan pembangunan sektoral dan pembangunan regional membawa

konsekwensi terhadap pengalokasian sumber daya yang tersedia dan penggunaan pembangunan.

Negara Indonesia dengan wilayah yang cukup luas yang terdiri dari ribuan pulau dan budaya kondisi ekonomi dan sosial yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, mutlak diperlukan suatu sistem pemerintah daerah yang efektif. Maka secara jelas dinyatakan dalam GBHN, bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan otonomi daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Maka peranan pemerintah daerah akan semakin penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih aktif dalam memobilisasi sumber dananya sendiri, di samping mengelola dananya yang diterima dari pusat, sehingga Pendapatan Asli Daerahnya dapat ditingkatkan. Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan desentralisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Desantralisasi ialah fungsi pemerintah tertentu dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang mencakup lembaga perwakilan yang dipilih yaitu tujuan akhir untuk meningkatkan daya guna dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam hal pelayanan bagi masyarakat. Pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun di daerah tingkat satu dengan titik berat otonomi daerah pada tingkat II. Diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999.

Untuk menggali Pendapatan Asli Daerah dituntut peran aktif instansi/dinas/unit kerja yang terkait langsung dengan Pendapatan Asli Daerah. Karena

rumah tangganya sendiri, serta mampu menyusun struktur anggaran rumah tangganya sendiri (APBD).

Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan guna melayani masyarakat serta kelancaran pembangunan daerah. Sehingga pembangunan di daerah diarahkan agar dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus dapat meningkatkan perekonomian nasional.

Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah akan mampu mengelola sumber-sumber penerimaan dengan baik dan mengalokasikan sebaik mungkin untuk mencapai pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan pendayagunaan potensi secara optimal dan terpadu.

Otonomi daerah ditujukan bagi Daerah Tingkat II, dalam hal ini adalah kabupaten. Di setiap propinsi terdapat beberapa kabupaten. Masing-masing otonomi di kabupaten atau pada Dati II akan tercermin ke Dati I, maka dengan itu untuk mempermudah penelitian, penelitian ini akan mengarah ke propinsi.

Untuk itulah penulis mengambil judul “KETAHANAN FISKAL DAERAH INDONESIA” untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Perumusan Masalah

Ketahanan fiskal daerah adalah bagaimana masing-masing daerah melaksanakan kewenangannya. Dalam hal ini adalah kreativitas daerah, kemampuan organisasi pemerintah daerah serta kemampuan daerah untuk mencukupi kebutuhan daerahnya masing-masing. Dalam memenuhi kebutuhan daerah tersebut perlu diketahui variable-variabel yang mempengaruhi ketahanan fiskal daerah diantaranya jumlah penduduk, luas area, jumlah penduduk miskin dan PDRB, untuk itu dapat dirumuskan masalah :

1. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap ketahanan fiskal daerah
2. Apakah Luas Daerah berpengaruh terhadap ketahanan fiskal daerah.
3. Apakah Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh terhadap ketahanan fiskal daerah.
4. Apakah PDRB berpengaruh terhadap ketahanan fiskal daerah.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai didalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat perkembangan perekonomian di setiap propinsi terhadap derajat ketahanan fiskal daerah.
2. Untuk mengetahui jumlah penduduk, luas area, jumlah penduduk miskin dan PDRB mempengaruhi ketahanan fiskal daerah.
3. Untuk mengetahui perkembangan propinsi sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat memberi manfaat dan sumber guna pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ketahanan fiskal daerah di Indonesia, disamping untuk memperkaya penelitian sejenis yang telah ada dan dapat menjadi pertimbangan penelitian berikutnya.
2. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pendidikan, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi.
3. Salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

1.5. Hipotesis

Pada dasarnya hipotesis ini adalah kesimpulan sementara tentang hubungan antar variabel yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis ini diperlukan untuk mengarahkan pada operasional penelitian, sehingga mempermudah pada kesimpulan yang akan diambil. Berkenaan dengan ini hipotesis yang akan diambil adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketahanan fiskal daerah
2. Luas area berpengaruh positif terhadap ketahanan fiskal daerah.
3. Jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap ketahanan fiskal daerah.
4. PDRB berpengaruh positif terhadap ketahanan fiskal daerah

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan diseluruh daerah di Indonesia pada tahun 1996 sebelum otonomi daerah, 2000 masa transisi dan tahun 2002 setelah adanya otonomi daerah.

1.6.2 Data dan Sumber data.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah ada baik dari literatur ataupun dari buku-buku yang lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross section yaitu tahun 1996 untuk sebelum otonomi daerah, 2000 sebagai tahun transisi dan tahun 2002 untuk setelah otonomi daerah.

Adapun data yang digunakan adalah :

- Statistik keuangan daerah tahun 1996, 2000 dan 2002, BPS Yogyakarta
- Jumlah penduduk, luas area, penduduk miskin, BPS Yogyakarta.
- PDRB di setiap daerah, BPS Yogyakarta
- Media massa, jurnal, studi pustaka serta lembaga lain yang berkaitan dengan masalah ini

1.6.3 Analisis Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis fungsi regresi. dengan cara ini dapat diketahui seberapa besar hubungan Masing-masing variabel independen atau dependen yang menjelaskan jumlah penduduk, luas area, jumlah penduduk miskin, dan PDRB,

terhadap variabel dependen atau variabel yang dijelaskan (PAD/APBD) sehingga dapat diformulasikan;

$$\text{PAD/APBD} = F(\text{jumlah penduduk, luas area, jumlah penduduk miskin, PDRB})$$

Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilakukan analisis regresi didasarkan pada sebaran (scatterplot) dari masing-masing variabel dependen regresi dapat dilakukan dengan 2 cara, yang pertama apabila sebaran masing-masing model diketahui didominasi oleh bentuk linear maka digunakan regresi linear, sedangkan apabila dalam bentuk sebaran didominasi oleh bentuk nonlinear maka regresi dilakukan dalam bentuk non linear. Bentuk persamaan yang digunakan adalah;

Persamaan regresi bentuk regresi linear

$$Y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + \dots + U$$

Persamaan regresi bentuk regresi non linear

$$Y = b_0 \cdot x_1^{b_1} \cdot x_2^{b_2} \cdot x_3^{b_3} \cdot x_4^{b_4} \dots + U_i$$

Persamaan regresi dalam tingkat non linear yaitu dengan terlebih dahulu mentransformasikan persamaan tersebut dalam bentuk logaritma sbb :

$$\text{Ln}Y = \text{Ln}b_0 + b_1\text{Ln}x_1 + b_2\text{Ln}x_2 + b_3\text{Ln}x_3 + b_4\text{Ln}x_4 \dots + U_i$$

Dimana b_0 adalah konstan b_1, b_2, b_3, b_4 merupakan koefisien elastisitas dan ketentuan b_0 adalah konstan b_1, b_2, b_3, b_4 , adalah

koefisien regresi dari masing-masing variable yang mempengaruhi jumlah PAD dan APBD.

$$\text{PAD/APBD} = y (X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Keterangan

- X_1 = jumlah penduduk
- X_2 = luas area
- X_3 = jumlah penduduk miskin
- X_4 = PDRB

Dalam penelitian ini penulis menggunakan regresi nonlinear dan diolah dengan menggunakan SPSS.

Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang lebih baik dalam analisis regresi. Tingkat ketepatan regresi ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R^2 yang besarnya sama dengan nol berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai tersebut semakin mendekati satu, berarti variabel independen semakin berpengaruh terhadap variabel dependen.

1.6.4 Uji statistik

Uji T (T-test)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara individu atau tidak.

Uji f(f-test)

Pengujian secara serentak koefisien regresi terhadap variabel-variabel penjelas digunakan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel yang ingin dijelaskan atau tidak

1.6.5 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Autokoreksi

Untuk menguji apakah hasil ottonomi suatu suatu model regresi tidak mengandung korelasi serial diantara disturbance termsnya maka dipergunakan Durbin Watson.

1 Multikoloniaritas

Multikoloniaritas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih dari variabel independen dapat dinyatakan sebagai kontribusi linear dari variabel independen lainnya. Multikolonioritas dapat diketahui dengan melihat nilai R^2 nya.

2 Heteroskedastisitas

Uji heteroskadartisitas untuk mengetahui apakah terdapat variasi dari semua gangguan (E_i) yang tidak konstan. Untuk menguji ada tidaknya heterokedasitisitas adalah dengan menggunakan uji Rank & Sperman.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, metodologi penelitian, regresi, uji statistik,

BAB 2 : LANDASAN TEORI

Berisikan penelitian penelitian yang telah diteliti dan Meliputi teori-teori yang membahas pendapatan asli daerah, Anggaran pendapatan belanja daerah, jumlah penduduk, luas area jumlah penduduk miskin, dan PDRB.

BAB 3 : GAMBARAN UMUM PENELITI

Menyajikan tentang obyek penelitian yang akan diteliti meliputi keadaan geografis, penduduk, dan perekonomian..

BAB 4 : METODE ANALISIS

Menyajikan cara pengolahan data dari regresi sampai pada uji asumsi klasik.

BAB 5 : NANALISIS DATA

Menyajikan hasil olahan data yaitu dengan meregresikan data yang telah ada, uji statistik, uji asumsi klasik, serta hypotesa

BAB 6 : SARAN DAN KESIMPULAN

Meliputi saran-saran mengenai hasil dari penelitian serta kesimpulan dari keseluruhan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Telaah Pustaka

Telaah pustaka membahas tentang penelitian sebelumnya dan sebagai sumber penelitian tentang ketahanan fiskal daerah.

Tujuan dari telaah pustaka adalah sebagai landasan teori untuk penelitian yang akan dikerjakan dan membandingkan hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya sehingga penelitian ini mempunyai landasan yang kuat dan dapat mengetahui perbedaan hasil yang diperoleh dari masing-masing.

2.1.1 Hasil Penelitian Purnama (Tahun 2001).

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Kabupaten Oku (Ogan Kemiringan Ulu)

menggunakan model regresi dengan hasil sebagai berikut:

$$\text{DOF} = -25,95 + 0,398 x_1 + 1,072 x_2 + 0,233 x_3 \quad (-1)$$

$$R^2 = 0,94$$

Dimana : DOF = Derajat otonomi fiskal

x_1 = Tingkat perkembangan ekonomi.

x_2 = Persentase bantuan umum terhadap bantuan pemerintah.

x_3 = Derajat otonomi fiskal tahun sebelumnya ⁽⁻¹⁾

- Kab. Muara Enim

Dengan menggunakan model regresi didapati hal sebagai berikut:

$$\text{DOF} = -4,184 + 0,659 x_1 + 0,752 x_2 + 0,119 x_3 \text{ (-1)}$$

$$R^2 = 0,94$$

Dimana DOF = Derajat otonomi fiskal.

x_1 = Tingkat perkembangan ekonomi.

x_2 = Persentase bantuan umum terhadap bantuan pemerintah.

x_3 = Derajat otonomi fiskal terhadap sebelumnya ⁽⁻¹⁾.

Dari hasil regresi diatas, terbukti dapat dilihat pengaruh positif dari :

Tingkat perkembangan ekonomi, semakin tinggi tingkat perkembangan ekonomi, semakin tinggi derajat otonomi fiskal.

Bantuan pemerintah pusat berpengaruh secara nyata terhadap derajat ekonomi fiskal daerah. Semakin tinggi bantuan umum didalam total bantuan pemerintah pusat, semakin meningkat pula derajat otonomi fiskal.

Dari hasil pengujian dengan menggunakan Chow test, derajat otonomi fiskal antara Kabupaten Muara Enim sebagai daerah percontohan otonomi berbeda dengan Kabupaten Oku yang bukan daerah percontohan.

2.1.2 Dari Hasil Penelitian Hari Prabtadi (2001)

Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{LnY} = 12.650258 + 2,6937845 \text{ Ln}x_1 + 3.4128744 \text{ Ln}x_2 - 0,00976648 \text{ Ln}x_3$$

Dimana : x_1 = Jumlah Penduduk

x_2 = PDRB

x_3 = Inflasi

Dari penelitian diatas didapat bahwa jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap PAD, sedangkan variabel inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap PAD.

2.1.3 Hasil Penelitian Elia Radianto (1997)

Hasil penelitian tersebut dengan hasil sebagai berikut :

$$\text{Dof} = -0,5012 + 0,2086x_1 + 0,7760x_2 + 0,0489 \text{ by}$$

$$R_2 = 0,9862$$

$$\text{Dw} = 2,3725$$

Dimana : x_1 = Tingkat perkembangan ekonomi

x_2 = Bantuan

by = Derajat otonomi fiskal tahun sebelumnya

Dari hasil pengolahan data terlihat bahwa tingkat perkembangan ekonomi dan bantuan pemerintah pusat signifikan pada derajat kepercayaan $\alpha = 5$ persen, baik untuk kabupaten, propinsi Maluku maupun untuk penggabungan seluruh daerah tingkat II Propinsi Maluku, Begitu juga,

mekanisme penyesuaian melalui koefisien B_y dapat diterima secara statistik dan sangat meyakinkan pada derajat kepercayaan.

$\alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme model penyesuaian derajat otonomi fiskal dapat digunakan untuk melihat pengaruh jangka panjang variabel-variabel yang digunakan terhadap derajat otonomi fiskal daerah.

Selanjutnya R^2 menunjukkan angka yang sangat mengherankan, hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat perkembangan ekonomi (TPE) dan bantuan pemerintah pusat (G) mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap derajat otonomi fiskal (Y). dengan demikian, baik variabel tingkat perkembangan ekonomi dan bantuan pemerintah pusat mempunyai pengaruh yang positif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap derajat otonomi fiskal daerah.

2.2 Landasan Teori

Tinjauan Mengenai Ketahanan Fiskal

Di dalam pemerintahan Indonesia, pemerintah dituntut berperan aktif dalam menjalani roda pemerintahan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pemerintah memerlukan kebijakan-kebijakan yang tepat akan sarannya. Di dalam ekonomi kebijakan yang diterapkan pemerintah salah satunya adalah kebijakan fiskal.

2.2.1 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) uang oleh pemerintah.

2.2.2. Macam-Macam Kebijakan Fiskal

Dalam perkembangannya ada 4 macam kebijakan fiskal : (Suparmoko, 1994 : 257)

1. Pembiayaan fungsional (functional finance)

Tokoh kebijakan ini adalah A.D. Learner. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama dalam meningkatkan kesempatan kerja.

2. Pengeluaran Anggaran

Tokoh kebijakan ini adalah Alum hansen. Hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi sehingga pada suatu saat terdapat surplus maupun defisit.

3. Stabilitas anggaran otomatis

Dengan stabilitas otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam

kegiatan usaha. Program pengeluaran pemerintah dan perpajakan tidak akan berubah. Namun penerimaan dari pajak akan menurun, terutama dari pajak pendapatan. Dalam pihak jumlah pengeluaran pemerintah akan meningkat terutama yang dikaitkan dengan gaji, pensiun, bantuan sosial dan sebagainya.

4. Anggaran belanja seimbang

Suatu modifikasi dari pembelanjaan atau dasar anggaran yang disesuaikan dengan keadaan (managed budget) adalah pembelanjaan secara seimbang dalam jangka panjang, tetapi ditempuh depresi dan surplus pada masa inflasi.

2.2.3. Fungsi Kebijakan Fiskal

Fungsi kebijakan fiskal antara lain adalah (Musgrave, 1991:5)

1. Fungsi alokasi

Peran fungsi alokasi sangat penting diperlukan dalam menciptakan alokasi sumber ekonomi, sehingga tercapai alokasi sumber ekonomi yang efisien. Peran ini sangat diperlukan karena mekanisme dasar tidak selalu mampu dalam menyediakan barang, khususnya barang publik, dengan demikian pemerintah berperan menggantikan fungsi pasar dalam penyediaan barang yang tidak mampu disediakan oleh pasar tersebut.

2. Fungsi distribusi

Peran fungsi distribusi ini juga dianggap sangat penting karena mekanisme dan dasar dalam banyak kasus justru menciptakan distribusi yang semakin tidak merata.

3. Fungsi stabilisasi

Peran fungsi ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi gejolak harga yang diakibatkan oleh kenaikan permintaan maupun penawaran. Dalam hal ini pemerintah bisa membuat sebuah regulasi yang mampu menjamin pasar berada dalam kondisi keseimbangan.

2.2.4 Desentralisasi Fiskal dan Perimbangan Keuangan Daerah

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yg harus diperhatikan dan dilaksanakan. artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah. Pelimpahan sebagai wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. artinya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, kecenderungan semakin besar dalam

pengelolaan biaya yang dibutuhkan daerah. namun dalam pengelolaan pembiayaan tugas desentralisasi, prinsip efisiensi juga menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan.

Desentralisasi fiskal dalam undang undang nomor 25 tahun 1999 menyatakan, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari dari desentralisasi fiskal. kebijakan desentralisasi fiskal dalam mendukung otonomi daerah juga sedikit banyak bergantung pada kebijakan APBN dan ekonomi makro.

Konsep perimbangan keungan pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistim pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata acara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

1. Pembagian kekuasaan yang rasional diantara tingkat-tingkat pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dana.

2. Pembagian seluruh sumber dana yang adil dan memadai untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan, dana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.
3. Upaya fiskal oleh pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan pembagian yang adil atas seluruh beban pengeluaran pemerintah.

2.2.5 Posisi Fiskal

Posisi fiskal suatu daerah dapat diketahui dengan cara yaitu jumlah pajak yang sungguh sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak dan dibandingkan dengan potensi pajak yaitu jumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak yang biasanya berupa pendapatan perkapita. Ratio antar usaha pajak yang biasanya berupa pendapatan perkapita ratio antar dan potensi pajak ini disebut dengan pelaksanaan pajak. posisi fiskal dapat dipelajari dengan indeks pelayanan pajak ($\text{tax performance} = \text{tax effort standar} \times 100$).

Elastisitas pajak suatu daerah terhadap PDRB didaerah tersebut merupakan suatu cara untuk mendeteksi posisi pajak disuatu daerah atau jenis pajak tertentu, dengan rumus :

$$E = d(\text{Tr}) / d(\text{Tr}) \cdot y / \text{Tr}$$

Dimana : E = elastisitas pajak di daerah atau jenis pajak tertentu

Tr = penerimaan pajak

Y = PDRB pada harga berlaku

$D =$ perubahan

Elastisitas pajak ini mengetahui kepekaan perubahan pajak terhadap perubahan PDRB. Jika $E > 1$ maka setiap perubahan dalam PDRB sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan dalam penerimaan pajak daerah itu kuat. Sedangkan bila $E < 1$ berarti setiap perubahan dalam PDRB sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan dalam penerimaan pajak lebih kecil dari 1% berarti pajak daerah itu tidak elastis, atau posisi pajaknya lemah.

2.2.6 Ketergantungan Fiskal

Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini terlihat jelas dari rendahnya proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan di banding dengan besarnya subsidi yang diberikan dari pemerintah pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah ratio antara PAD dengan total PAD. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih dari perusahaan daerah dan lain lain penerimaan. Rendahnya PAD dapat mengakibatkan terjadinya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. (Mudrajat kuncoro, 1999, hal 28)

1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber PAD
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, semua pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung di tarik oleh pemerintah pusat. alasan sentralisasi

perpajakan untuk mencegah atau mengurangi disparitas antar daerah, efisiensi administrasi dan keseragaman perpajakan.

3. Walaupun pajak daerah cukup banyak tetapi hanya sedikit yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah.
4. Adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya separatisme dan disintegrasi.
5. Lemahnya dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Bila kondisi ini terus berlangsung pembangunan daerah yang pesat akan berarti pula meningkatnya beban anggaran pemerintah pusat, salah satu jalan alternatif yang cukup baik yaitu dengan desentralisasi.

2.3 Pendapatan Asli Daerah dan APBD

Pendapatan daerah dalam arti luas adalah pendapatan yang bukan saja meliputi penerimaan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri tetapi, juga penerimaan dari pemerintah pusat. Sedangkan pendapatan daerah dalam arti sempit adalah pendapatan daerah sendiri atau dalam istilah formal disebut sebagai pendapatan asli daerah. Jadi pendapatan asli daerah tidak meliputi penerimaan yang diperoleh dari pemerintah pusat tetapi hanya meliputi pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah itu sendiri.

Sumber pendapatan asli daerah biasanya meliputi pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas dan lain-

lain usaha daerah yang sah. Retribusi daerah dimaksudkan sebagai pungutan langsung yang dikenakan untuk pelayanan tertentu dari pemerintah daerah.

Pada dasarnya ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam retribusi yaitu :

1. Terdapatnya kebebasan dalam memilih pelayanan
2. Pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan yang dikenakan
3. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

Pajak daerah adalah iuran yang dipaksakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung. secara teoritis pajak daerah diharapkan dapat memenuhi persyaratan antara lain, pajak daerah tidak boleh bertentangan atau harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya. Biaya administrasi harus rendah, Pajak daerah tidak mencampuri sistem dari perpajakan yang ada di pusat dan beban pajak relatif seimbang dengan standar pajak yang ditetapkan secara bersama.

Pendapatan asli daerah (PAD) sering dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh dana yang digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang di kehendaki oleh setiap daerah. (Suparmoko, 1987 : 34-35)

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau pendapatan) dimasa yang akan datang umumnya disusun untuk satu tahun. Anggaran juga merupakan alat kontrol atau

pengawasan terhadap pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang. 3 fungsi anggaran sebagai alat kontrol atau pengawasan anggaran (budget) yakni fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat, fungsi perbaikan distribusi pendapatan dan fungsi stabilitas perekonomian.

Dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999 Bab VII Pasal 78 dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan dan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat didaerah dibiayai dari dana beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah juga perlu memahami dari mana sumber keuangan daerah itu akan diperoleh. APBD untuk setiap daerah di Indonesia biasanya selalu mengalami kenaikan, hal ini di akibatkan oleh banyaknya tuntutan masyarakat daerah, dimana pemerintah daerah harus lebih banyak lagi menyediakan barang-barang publik yang bersifat khusus seperti dalam hal penerangan jalan, mobil pemadam kebakaran, penyediaan rambu lalu lintas jalan dan sebagainya.

APBD harus disiapkan oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA) atas persetujuan DPRD, selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya APBN. Perubahan APBD dimungkinkan dan ditetapkan dengan PERDA selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Selanjutnya perhitungan APBD ditetapkan dengan

PERDA selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Akhirnya APBD yang telah ditetapkan dengan PERDA disampaikan kepada Gubernur bagi pemerintahan kabupaten/kota dan kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi pemerintah provinsi untuk diketahui.

2.3.1. Penyusunan APBD

Sistem penyusunan dan pelaksanaan APBD erat kaitannya dengan pola yang berlaku dalam APBN. Hal ini terlihat dari antara lain :

- a. Anggaran yang disusun merupakan kombinasi antara klasifikasi organisasi dan objek dalam literatur dikenal sebagai line budgeting.
- b. Masing-masing organisasi menghendaki jumlah pembagian dana (plafon) yang lebih besar, walaupun sasaran yang hendak dicapai kurang jelas.
- c. Tingkat ketergantungan belanja pegawai dan pembangunan daerah sangat tinggi (rata-rata diatas 70%) gaji pegawai hampir 100% dibayar APBN kecuali pegawai honor daerah.
- d. Anggaran disusun berdasarkan persentase kenaikan dari tahun ke tahun berikutnya sehingga yang dipikirkan oleh para penyusun APBD, berapa tambahan dana yang akan diperoleh dari pusat.

Dengan dimulainya otonomi daerah Januari 2001 penyusunan APBD dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Dalam peraturan pemerintah No. 105 Tahun 2000 dikemukakan azas umum dasar proses penyusunan APBD.

2.3.2. Proses Penyusunan APBD

Dalam setiap proses penyusunan APBD harus diperhatikan tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Namun bagaimana kondisi APBD suatu daerah tergantung pada kapasitas pendapatan daerah yang bersangkutan, adapun caranya sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan umum APBD antara Pemda dan DPRD
2. Penyusunan strategi pola prioritas oleh Pemda
3. Penyusunan RAPBD oleh Pemda
4. Pembahasan RAPBD dilakukan oleh Pemda dan DPRD
5. Penetapan APBD dengan Pemda
6. Perubahan APBD paling lambat 3 bulan

2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Derajat Kemandirian Fiskal :

- **Jumlah Penduduk**

Untuk otonomi daerah jika jumlah penduduk suatu daerah sangat banyak atau semakin besar maka semakin besar pula potensi yang dimiliki daerah untuk melaksanakan pembangunannya. Namun disisi yang lain semakin besar jumlah penduduk juga akan membebani neraca APBD dimana nantinya pemerintah daerah akan menambah pengadaan atau penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan.

- **Luas Area**

Daerah yang luas dan yang kecil memiliki keuntungan dan kerugian, diantaranya bagi daerah yang kecil PAD yang diterima relatif lebih kecil,

sedangkan beban PAD untuk pengembangan daerah juga akan kecil. Bagi daerah yang luas dari pengelolaan sumber daya alam yang baik maka akan mendatangkan keuntungan yang besar, begitu pula dengan beban PAD juga akan ikut besar untuk pengembangan daerah.

- **Jumlah Penduduk Miskin**

Kemiskinan adalah masalah yang harus dipecahkan oleh pemerintah daerah. Kemiskinan ini berdampak negatif bagi ketahanan fiskal daerah. Dengan melalui ekonomi kerakyatan kemiskinan daerah diharapkan dapat dikurangi. Untuk itu pemerintah daerah harus mengalokasikan dana yang bersumber dari PAD, selain dari PAD untuk membantu masyarakat miskin ini, pemerintah daerah harus mencari alokasi sumber-sumber dana yang baru. Tujuan pengalokasian dana dari PAD dan sumber dana yang baru ini adalah untuk mengangkat harkat dan martabat orang miskin di mata masyarakat.

- **PDRB.**

PDRB ini berpengaruh negatif terhadap ketahanan fiskal daerah. Kenaikan PDRB ini akan mendorong meningkatnya pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah akan dapat menjalankan pembangunan daerah dan akan membawa daerah dan masyarakatnya kedalam kondisi yang lebih baik, maju, dan sejahtera.

BAB III
GAMBAR UMUM
PENELITIAN

3.1. Keadaan Geografi

Indonesia terletak antara 6° 08' Lintang Utara dan 11° 15' Lintang Selatan dan antara 94° 45' Bujur Timur dan 141°05' Bujur Timur. Negara kesatuan yang berbentuk Republik ini sejak tahun 2001 dibagi menjadi 30 provinsi dengan 4 (empat) tambahan provinsi, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, dan Maluku Utara (sejak 1999 Timor-Timur tidak lagi merupakan wilayah Indonesia). Pada tahun 2002 provinsi-provinsi tersebut terdiri dari 302 kabupaten, 89 kota, 4.918 kecamatan dan 70.460 desa.

Indonesia merupakan negara bahari dengan luas lautnya sekitar 7,9 juta kilometer persegi (km²) (termasuk daerah Zone Economic Exclusive) atau 81 persen dari luas keseluruhan. Daratan Indonesia yang mempunyai luas lebih dari 1,9 juta km², mempunyai puluhan atau mungkin ratusan gunung api dan sungai. Sehubungan dengan letak negara Indonesia yang dikelilingi beberapa samudera, serta banyak terdapat gunung berapi yang masih aktif, menyebabkan Indonesia sering dilanda gempa. Pada tahun 2001 gempa sebesar 6,8 skala Richter terjadi pada tanggal 19 Oktober 2001 dengan pusat gempa terletak pada 4,30 Lintang selatan dan 124,60 Bujur Timur.

3.2. Penduduk

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan sebagaimana tertuang dalam GBHN. Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya dari seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka memecahkan masalah kependudukan. Usaha-usaha yang mengarah pada pemerataan penyebaran penduduk telah dilakukan dengan cara memindahkan penduduk Pulau Jawa ke Luar Jawa melalui program transmigrasi. Selain itu dengan mulai di berlakukannya otonomi daerah, di harapkan dapat mengurangi perpindahan penduduk terutama propinsi-propinsi di Pulau Jawa. Usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk juga telah dilakukan pemerintah melalui Program Keluarga Berencana yang dimulai awal tahun 1970-an.

Hampir semua propinsi mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk kecuali Riau, D.I. Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa propinsi mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tajam sudah dibawah 1 persen, seperti Propinsi Sumatera Barat, Bangka Belitung DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Jumlah penduduk pada tahun 2002 diperkirakan sebesar 212 juta jiwa. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan penduduk
Menurut propinsi tahun 1996, 2000 dan 2002
 (%)

No	Daerah/propinsi	Tahun 1996	Tahun 2000	Tahun 2002
1	Dista Aceh	2.72	1.46	1.21
2	Sumatera Utara	2.03	1.32	1.28
3	Sumatera Barat	1.62	0.63	0.58
4	Riau	4.22	4.35	4.42
5	Jambi	3.39	1.84	1.78
6	Sumatera Selatan	3.15	2.39	2.35
7	Kep. B Belitung	-	0.97	0.91
8	Bengkulu	4.38	2.97	2.71
9	Lampung	2.66	1.17	1.04
10	DKI Jakarta	2.38	0.17	0.16
11	Jawa Barat	2.57	2.03	1.96
12	Banten	-	3.21	3.09
13	Jawa Tengah	1.17	0.94	0.87
14	DI Yogyakarta	0.57	0.72	0.77
15	Jawa Timur	1.08	0.70	0.66
16	Bali	1.18	1.31	1.26
17	Kalimantan Barat	2.65	2.29	2.18
18	Kalimantan Tengah	3.88	2.99	2.84
19	Kalimantan Selatan	2.32	1.45	1.36
20	Kalimantan Timur	4.41	2.80	2.70
21	Sulawesi Utara	1.60	1.33	1.29
22	Gorontalo	-	2.57	2.53
23	Sulawesi Tengah	2.82	1.59	1.51
24	Sulawesi Selatan	1.42	1.49	1.52
25	Sulawesi Tenggara	3.66	3.15	3.05
26	NTB	2.14	1.82	1.62
27	NTT	1.79	1.64	1.58
28	Maluku	2.76	0.08	0.07
29	Maluku Utara	-	0.48	0.46
30	Papua	3.34	3.22	3.18
	Indonesia	1.97	1.49	1.36

Sumber : BPS Yogyakarta

3.3 Ekonomi

Dalam era globalisasi saat ini, peristiwa yang terjadi disuatu belahan bumi, akan mempengaruhi belahan bumi lainnya. misalnya peledakan World Trade Center dan Pentagon pada tahun 2000 memperparah perekonomian dunia, terjadinya pemogokan masal pekerja pelabuhan-pelabuhan pantai barat amerika pada awal bulan oktober 2002 sempat mengkhawatirkan banyak negara, termasuk Indonesia.hal ini tantu akan berdampak pada tersendatnya ekspor negara kita yang mempunyai hubungan dagang dengan amerika, yang berujung pada menurunnya kinerja perekonomian Indonesia.

Tabel 3.2
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993
Menurut Lapangan Usaha Tahun 1996, 2000 dan 2002
(Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	1996	2000	2002
1	Pertanian,peternakan,perikanan Dan kehutanan	63 609.5 (-1.38)	66 208.9 (1,88)	68 108.4 (1,74)
2	Pertambangan dan penggalian	37 474.0 (-2.76)	38 896.8 (5,51)	39 768.1 (2,25)
3	Industri pengolahan	95 320.6 (-11.44)	109290.2 (5.98)	113671.1 (4,01)
4	Listrik, gas dan air bersih	5 646.1 (3.03)	7 078.2 (7,56)	113671.7 (6,17)
5	Bangunan	22 465.3 (-36.44)	24 259.1 (5,64)	7514.6 (4.11)
6	Perdagangan, hotel dan restoran	60 130.7 (-18.22)	66 888.1 (5,67)	25 255.3 (3,61)
7	Pengangkutan dan komunikasi	26 975.1 (-15.13)	31 207.1 (8,59)	69 303.2 (7,83)
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	28 278.7 (-26.63)	28 388.6 (4,92)	33 649.5 (5,55)
9	Jasa-jasa	36 475.0 (-3.85)	38 826.6 (2,33)	29 963.2 (1,98)
10	Produk domestik bruto (PDB)	376 374.9 (-13.13)	411 961 (4,92)	39 596.6 (3,66)

Catatan :Angka dalam kurung adalah laju pertumbuhan %

Berdasarkan table 3.2 PDB atas harga konstan 1993, perekonomian Indonesia pada tahun 1996 sebesar minus 13.13 persen, pada tahun 2000 mengalami percepatan laju pertumbuhan yang cukup besar, yaitu 4,92 persen namun pada tahun 2001 mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 3,44 persen sebagai akibat lemahnya perekonomian dunia dan dampak peristiwa 11 September di Amerika. Pada tahun 2002 ekonomi Indonesia tumbuh 3,66 persen yaitu lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun lebih rendah dari Indonesia target yang ditetapkan pemerintah sebesar 4 persen dalam asumsi APBN 2002. Tidak tercapainya target angka pertumbuhan tersebut, selain masih belum pulihnya perekonomian dalam negeri, juga ditambah dengan adanya peristiwa peledakan bom di Bali pada 12 Oktober 2002, yang sempat membuat kekhawatiran akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia, terutama sub sektor-sub sektor yang terkait dengan pariwisata.

Dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2002, pertumbuhan tertinggi terjadi disektor pengangkutan dan komunikasi, dengan laju pertumbuhan sebesar 7,83 persen. Pertumbuhan tertinggi kedua adalah sektor listrik, gas dan air bersih dengan laju pertumbuhan sebesar 6,17 persen, sementara pada tahun sebelumnya, sektor ini mencapai laju pertumbuhan lebih tinggi sebesar 7,65 persen. Sektor Industri yang mempunyai kontribusi sekitar seperempat dari PDB pada tahun 2002 hanya tumbuh 4,01 persen. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan

mengalami pertumbuhan terendah, yaitu sebesar 1,74 persen, sementara pada tahun 2001 sektor ini hanya mencapai angka pertumbuhan sebesar 0,98 persen.

Pengeluaran pemerintah

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2002 didorong oleh permintaan konsumsi rumah tangga dan pemerintah yang tumbuh masing-masing 4,72 persen dan 12,79 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kedua pengeluaran tersebut mengalami percepatan pertumbuhan dimana pada tahun 2000 permintaan konsumsi rumah tangga dan pemerintah masing-masing tumbuh 4,39 persen dan 8,98 persen. Untuk ketiga jenis pengeluaran yang lain, yang pada tahun 2000 mengalami pertumbuhan positif, pada tahun 2002 mengalami kontraksi dengan penurunan tertinggi terjadi pada impor barang dan jasa yang turun sebesar 8,33 persen, diikuti ekspor barang dan jasa sebesar 1,24 persen.

Tabel 3.3
Produk Domestik Bruto Atas dasar Konstan 1993
Menurut Pengeluaran, 1996 dan 2002
(Miliar Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	1993	2000	2002
1	Pengeluaran konsumsi RT	260022.7 (-6.17)	276377.2 (1.58)	302139.3 (4.72)
2	konsumsi pemerintah	26827.9 (-15.37)	28767.8 (6.49)	35362.4 (12.79)
3	Pembentukan modal tetap Domestik bruto	93604.7 (-33.01)	89389.1 (16.74)	96058.0 (-0.19)

4	Perubahan stok	-6386.9	-13794.2	-25741.0
5	Ekspor barang-barang dan Jasa-jasa	134707.2 (-11.18)	116193.6 (26.48)	116907.1 (-1.24)
6	Dikurangi : import barang-Barang dan jasa	132400.7 (-5.29)	98916.6 (25.93)	97985.2 (-8.33)
7	Produk domestik bruto	376374.9 (-13.13)	398016.9 (4.92)	426740.5 (3.66)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan laju pertumbuhan.

Sumber : BPS (Indikator Ekonomi).

Inflasi

Sebelum terjadinya krisis ekonomi, laju inflasi dapat dikendalikan pada level satu digit. namun pada saat krisis ekonomi sekitar pertengahan tahun 1997, yang disusul dengan kerusuhan hingga menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok serta terhambatnya jalur distribusi barang dan jasa, laju inflasi mulai merambah menjadi dua digit, yaitu sebesar 8,05 persen pada tahun 1996, dikarenakan belum stabilnya perekonomian di negara ini maka, pada tahun 2000, laju inflasi turun sedikit lebih baik menjadi 9.35 persen, untuk tahun 2002 laju inflasi kembali kedua digit menjadi 10,03 persen.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.4

Tabel 3.4
Laju Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Barang Kebutuhan
Tahun 1996, 2000 dan Tahun 2002
(%)

No	Kelompok barang kebutuhan	1996	2000	2002
1	Bahan makanan	18.45	4.00	9.13
2	Makanan jadi, Minuman, Rokok	-	11.08	9.18
3	Perumahan	6.08	10.10	12.71
4	Sandang	7.67	10.19	2.69
5	Kesehatan	8.11	9.57	5.63
6	Pendidikan, Rekreasi, Olah raga	-	17.51	10.85

7	Transportasi dan komunikasi	-	12.66	15.52
8	Umum	8.05	9.35.	10.03

Sumber : BPS yogyakarta

Tingkat inflasi memang harus terkendali agar tetap ada tingkat yang wajar baik didaerah maupun di tingkat nasional. Pada tingkat inflasi yang tinggi masyarakat enggan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang produktif, lebih senang pada kegiatan yang bersipat spekulatif, sehingga untuk inflasi yang tinggi akan mengganggu kegiatan ekonomi.

BAB IV

METODOLOGI ANALISIS

4.1 Teori Regresi

Adalah regresi dikenalkan oleh Francis Bolton dalam hukum regresi semesta. Tujuan utama analisa regresi adalah mendapatkan dugaan dari salah satu variabel dengan menggunakan variabel lain yang diketahui. (Djarwanto Ps, 1986 : 306).

Penaksiran Modan menyatakan bahwa analisa terutama berkenaan dengan penaksiran dan/peramalan nilai rata-rata hitung atau nilai rata-rata (populasi). Variabel bebas atau hitung atai nilai rata-rata (populasi). Variabel bebas atau dasar nilai variabel yang menjelaskan yang tetap (fixed) atau diketahui. Peramalan dari suatu fungsi regresi populasi (PRF) atau dasar fungsi regresi digunakan metode kuadrat terkecil biasa (metode of ordinary square). Beberapa penyajian perlu dilakukan terhadap hasil regresi metode OLS adalah penyajian hypotesis dan asumsi klasik (Gujarati 1995:14)

4.1.1 Pengujian hypotesis

Penyajian hypotesis statistik, yang meliputi penyajian hypotesis secara serempak (uji f statistik) penyajian hypotesis secara individu (uji f-statistik) serta pengujian ketetapan perkiraan (R^2).

Uji t-statistik

Penyajian dilakukan dengan menggunakan t-statistik. Tujuan uji ini adalah menguji peramalan secara parsial atau sendiri-sendiri dengan tingkat kepercayaan tertentu.

Uji satu sisi positif, dalam hal ini hipotesis yang digunakan adalah:

- $H_0 : b_1 = 0$
- $H_a : b_1 > 0$

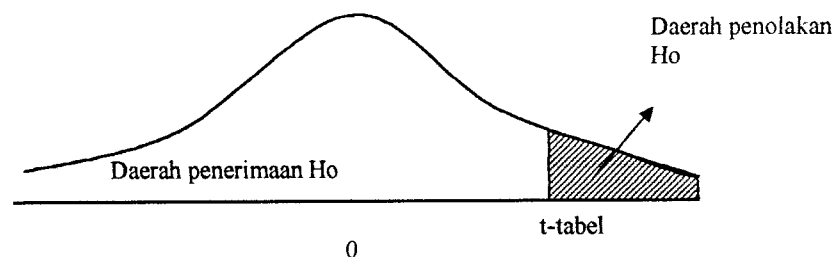
Kriteria penerimaan

- H_0 diterima jika $T\text{-hitung} < t\text{-tabel}$
- H_0 ditolak jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$

Daerah penerimaan dan penolakan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.1

Gambar kurva uji-t pada 1 sisi positif



Uji F-Test Statistik

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara serempak atau hubungan yang dapat dilihat dari nilai R^2 -nya. Model ini digunakan baik bila R^2 semakin mendekati angka 1.

Nilai R^2 dapat diperoleh dengan rumus (Damodar Gujarati, 1995 : 101)

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS} \text{ atau } R^2 = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum y_i^2}$$

Tujuan f-test statistik ini untuk mengkaji apakah model yang digunakan secara keseluruhan dapat digunakan pada tingkat kepercayaan tertentu dalam uji hipotesis ini yang digunakan adalah:

- h_0 : semua koefisien regresi nilainya = 0
- h_a : semua koefisien regresi nilainya $\neq 0$

f-hitung diperoleh dengan rumus (Gujarat., 1995 :120)

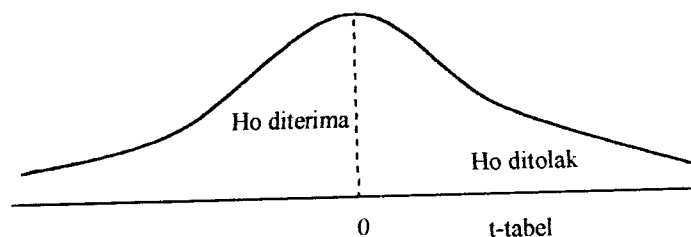
$$F = \frac{R^2(k-1)}{(1-R^2)(n-k)}$$

Kriteria uji f-test

- H_0 diterima jika f-hitung < T-tabel
- H_0 ditolak jika f-hitung \geq t-tabel

Daerah penerimaan H_0 penolakan H_0 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.2
Kurva Distribusi F



Jika f-hitung > t-tabel maka H_0 ditolak yang berarti bahwa semua variabel independen yang digunakan secara serempak dapat menyatakan/mempengaruhi variabel dependen yang dijalankan secara nyata.

Jika $f\text{-hitung} < f\text{ tabel}$ maka H_0 diterima yang berarti bahwa serempak tidak dapat menjadikan atau mempengaruhi variabel dependen yang dijadikan secara nyata.

Uji R^2 (Pengujian Ketetapan Perkiraan)

R^2 adalah suatu besaran yang lazim dipakai untuk mengukur kebaikan kesesuaian (goodness of fit) yaitu bagaimana garis regresi sampel mampu menjadikan fenomena yang terjadi. R^2 mengukur proporsi (bagian) atau persentase total variasi data (variabel independen yang dijadikan oleh model regresi). Semakin tinggi nilai R^2 maka regresi sampel semakin baik.

Tingkat ketetapan regresi ditunjukkan oleh besarnya koefisien R^2 , yang terletak pada $0 < R^2 < 1$. nilai R^2 diperoleh dari :

$$R^2 = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Regresi}}{\text{Total Jumlah Kuadrat}} = \frac{ESS}{TSS}$$

$$R^2 = \frac{TSS - RSS}{TSS} = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum x_i^2}{\sum y_i^2}$$

4.1.2 Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji autokorelasi

Autokorelasi adalah koerelasi antar anggota serangkaian observasi yang diruntutkan menurut waktu baik pada data pada time series maupun crossection. Dalam model regresi linear klasik diasumsikan bahwa autokorelasi tidak boleh ada dalam disturbance atau gangguan U_i . Untuk

mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji durbin-watson (D-W) sebagai berikut :

$$D = \frac{\sum_{t=2}^{t=n} (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{t=n} e_t^2}$$

Tujuan dari uji adalah untuk menguji apakah persamaan korelasi mengandung autokorelasi yaitu suatu keadaan dimana kesalahan pengganggu dalam periode tertentu berautokorelasi dalam kesalahan pengganggu dari periode lainnya (saling berhubungan).

Langkah pengujian

1. Menghitung perkiraan kesalahan pengganggu $e_i = Y_t - y_t$
2. Menghitung d melalui komputer
3. Mencari nilai kritis d_l dan d_u dari taabel n dan banyaknya variabel bebas x tertentu
4. Jika kelipatan nol H_0 : tidak ada korelasi serial positif maka
 - $d < d_l =$ tolak H_0
 - $d < d_u =$ terima H_0
 - $d_l < d < d_u$: tidak dapat disimpulkan
5. Jika hipotesa nol = H_0 : tidak ada korelasi serial negatif, maka
 - $d > 4-d_l$: tolak H_0
 - $d < 4-d_u$: terima H_0
 - $d_l < d < 4-d_l$ = tidak dapat disimpulkan

2. Multikolenieritas

Multikolenieritas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih dari variabel independen dapat dinyatakan sebagai kontribusi linear dari variabel independen lainnya. Multikolenieritas dapat diketahui dengan melihat nilai R^2 nya.

Jika ditemukan R^2 yang lebih besar dari R^2 model yang diteliti. Maka dari persamaan tersebut terdapat Multikolenieritas. Tetapi dari persamaan tersebut

Dalam penelitian ini digunakan VIF/ variance inflation faktor

$$VIF = \frac{1}{(1 - Rn^2)}$$

Jika VIF suatu variabel lebih dari 10, dimana hal ini terjadi ketika nilai R^2 melebihi 0.90, maka suatu variabel dikatakan berkorelasi sangat tinggi.

3. heterokedastisitas

Uji ini untuk mengetahui apakah terdapat variasi dari semua gangguan (E_i) yang tidak konstan. Untuk menguji ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan menggunakan uji Rank Spearman

BAB V

ANALISIS DATA

5.1 Analisis Data

Pada bab ini akan diuraikan data-data yang digunakan dalam penelitian, diskripsi data dan analisis hasil uji estimasi dengan analisis uji t, Uji F dan uji koefisien determinasi berganda terhadap asumsi klasik yang meliputi uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji Heteroskedastisitas. Selain itu juga diuraikan tentang pengujian secara ekonometri dan estimasi hasil yang diperoleh dalam perhitungan serta pengaruh variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen.

5.1.1 Analisis Hasil Estimasi

Hasil perhitungan regresi yang digunakan dengan bantuan program SPSS, diperoleh hasil estimasi sebagai berikut :

Tabel 5.1
Hasil Estimasi

Sebelum otonomi daerah		Massa transisi		Sesudah otonomi daerah	
1996		2000		2002	
Variable	Koefisien	Variable	koefisien	Variabel	Koefisien
Konstanta	-4.253 (-2.650)	Konstanta	-2.441 (-4.386)	Konstanta	-3.660 (-2.131)
Log X1	0.617 (2.361)	Log X1	0.379 (1.142)	Log X1	0.368 (0.372)
Log X2	-0.261 (-2.912)	Log X2	-0.309 (-4.689)	Log X2	-0.115 (-0.553)
Log X3	-0.403 (-1.653)	Log X3	-0.553 (-3.814)	Log X3	-0.273 (-0.535)
Log X4	0.694	Log X4	0.432	Log X4	0.370

	(2.987)		(2.502)		(0.609)
R ²	0.652	R ²	0.800	R ²	0.257
F stat	8.886	F stat	17.945	F stat	2.079
DW stat	1.303	DW stat	1.591	DW stat	2.035

Ket : Angka dalam kurung adalah t tabel

5.1.2 Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien Determinasi (R-Square) yang diperoleh dari hasil perhitungan sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 1996 nilai R² adalah 0.652 yang berarti bahwa sebesar 65.2 % variabel dependen Fiskal Daerah dipengaruhi oleh variabel independen (jumlah penduduk, luas area, jumlah penduduk miskin PDRB), dan 34.8 % yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya.
- Pada tahun 2000 nilai R² adalah 0.800 yang berarti bahwa sebesar 80 % variabel dependen Fiskal Daerah dipengaruhi oleh variabel independen (jumlah penduduk, luas area, jumlah penduduk miskin PDRB), dan 20 % yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya.
- Pada tahun 2002 nilai R² adalah 0.257 yang berarti bahwa sebesar 25.7 % variabel dependen Fiskal Daerah dipengaruhi oleh variabel independen (jumlah penduduk, luas area, jumlah penduduk miskin PDRB), dan 74.3 % yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya.

5.1.3 Pengujian Secara Serentak (uji F-stat)

Tabel 5.2

Uji F

Tahun	F-stat	F- tabel	Keterangan
1996	8.886	2.78	Signifikan
2000	17.945	2.78	Signifikan
2002	2.079	2.78	Tidak Signifikan

Dari uji F pada tahun 1996 dan 2000 diketahui model regresi Fiskal Daerah terhadap jumlah penduduk, luas area, jumlah penduduk miskin PDRB memiliki nilai F- hitung masing-masing 8.886 dan 17.945, sedangkan nilai F tabel adalah 2.78 . Pada kedua estimasi menunjukkan signifikan pada alpha 5 % karena $F\text{-hitung} > F\text{ tabel}$, hal ini berarti secara serentak variabel independen mempengaruhi variabel dependen selama periode pengamatan.

Sedangkan pada tahun 2002 diketahui model regresi Fiskal Daerah terhadap jumlah penduduk, luas area, jumlah penduduk miskin PDRB memiliki nilai F- hitung adalah 2.079, sedangkan nilai F tabel adalah 2.78 . Pada kedua estimasi menunjukkan signifikan pada alpha 5 % karena $F\text{-hitung} < F\text{ tabel}$, hal ini berarti secara serentak variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen selama periode pengamatan.

5.1.4 Pengujian Secara Parsial (uji t-stat)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel dependen secara individual, pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan t-statistik yang diperoleh hasil regresi dengan t-tabel. Dari

hasil perhitungan regresi yang dilakukan dengan menggunakan uji-t diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.3

Uji t

Variabel	t-stat		
	1996	2000	2002
X1	2.361 ^a	-4.386 ^a	0.372
X2	-2.912 ^a	1.412 ^b	0.553
X3	-1.653	-3.814 ^a	0.535
X4	2.987 ^a	2.502 ^a	0.609

Keterangan : ^a signifikan pada tingkat 5 % (1,706)
^b signifikan pada tingkat 10 % (1,315)

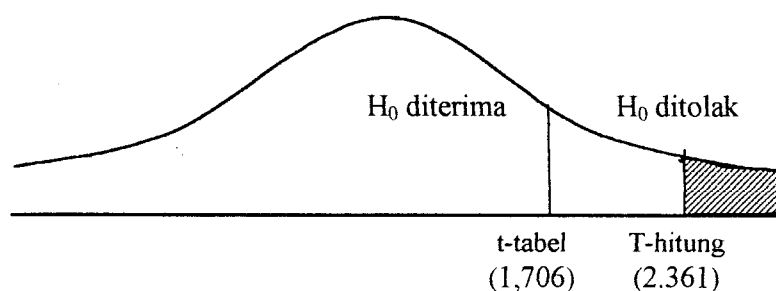
1. Sebelum Otonomi Daerah tahun 1996

1. Uji t terhadap parameter X_1 yaitu variabel Jumlah Penduduk.

Dengan tabel 5 % diperoleh t tabel sebesar 1,706 dan t statistik sebesar 2.361 sehingga H_0 ditolak. Artinya secara individu variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap fiskal daerah.

Gambar 5.1

Kurva uji t variabel jumlah penduduk

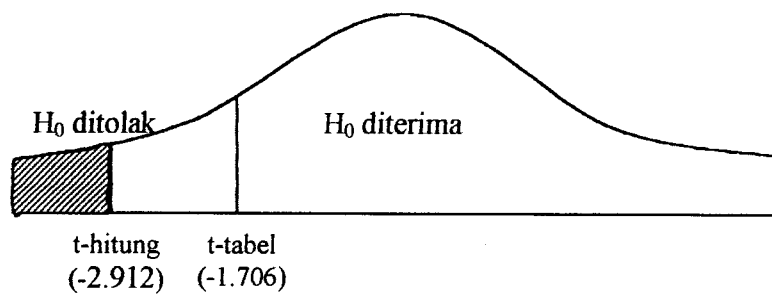


2. Uji t terhadap parameter X_2 yaitu variabel luas daerah

Dengan tabel 5 % diperoleh t tabel sebesar -1,706 dan t statistik sebesar -2.912 sehingga H_0 ditolak. Artinya secara individu variabel luas daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap fiskal daerah.

Gambar 5.2

Kurva uji t variabel luas daerah

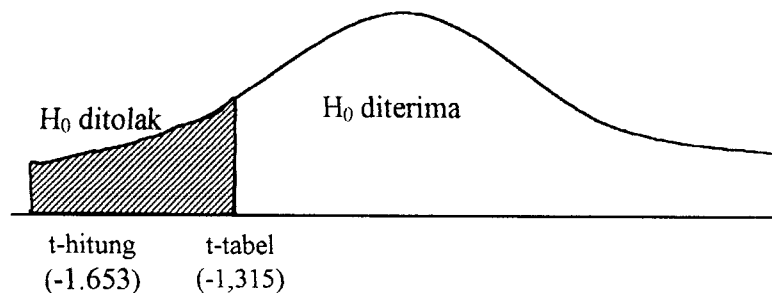


3. Uji t terhadap parameter X_3 yaitu variabel jumlah penduduk miskin

Dengan tabel 10 % diperoleh t tabel sebesar -1,315 dan t statistik sebesar -1.653 sehingga H_0 ditolak. Artinya secara individu variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan negatif terhadap fiskal daerah.

Gambar 5.3

Kurva uji t variabel jumlah penduduk miskin

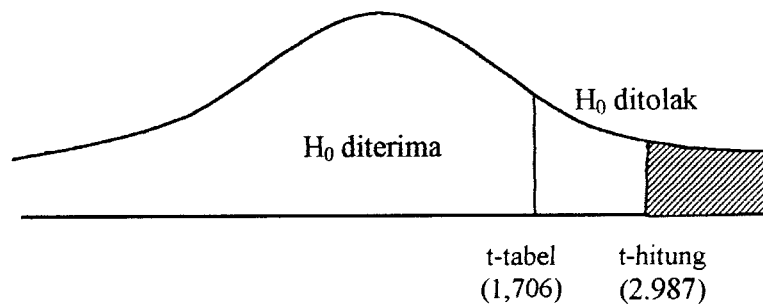


4. Uji t terhadap parameter X_4 yaitu variabel PDRB

Dengan tabel 5 % diperoleh t tabel sebesar 1,706 dan t statistik sebesar 2.987 sehingga H_0 ditolak. Artinya secara individu variabel PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap ketahanan fiskal daerah

Gambar 5.4

Kurva uji t variabel PDRB



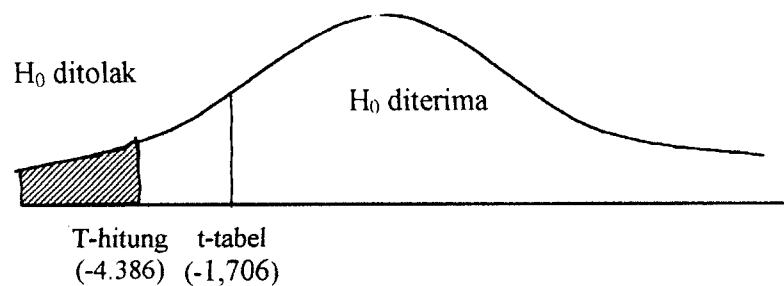
2. Masa Transisi Tahun 2000

1. Uji t terhadap parameter X_1 yaitu variabel Jumlah Penduduk.

Dengan tabel 5 % diperoleh t tabel sebesar -1,706 dan t statistik sebesar -4.386 sehingga H_0 ditolak. Artinya secara individu variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan negatif terhadap ketahanan fiskal daerah.

Gambar 5.5

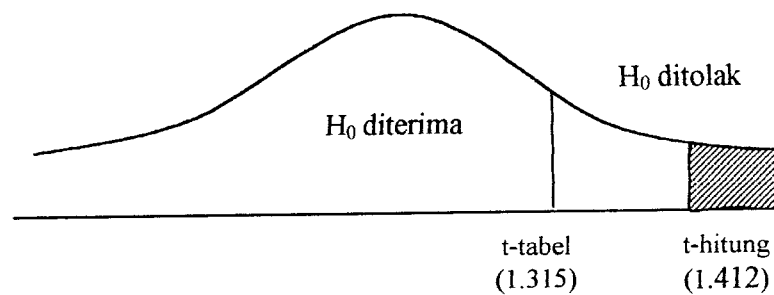
Kurva uji t variabel jumlah penduduk



2. Uji t terhadap parameter X_2 yaitu variabel luas daerah

Dengan tabel 10 % diperoleh t tabel sebesar 1.315 dan t statistik sebesar 1.412 sehingga H_0 ditolak. Artinya secara individu variabel luas daerah berpengaruh signifikan positif terhadap ketahanan fiskal daerah

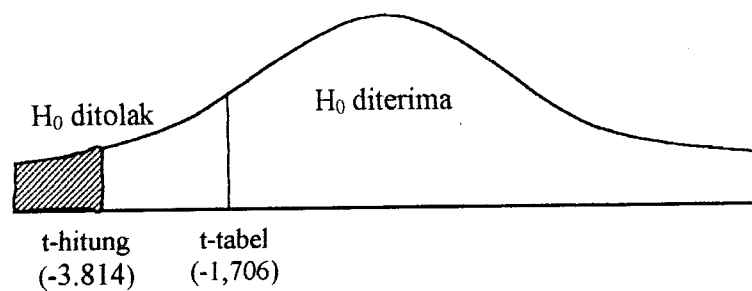
Gambar 5.6
Kurva uji t variabel luas daerah



3. Uji t terhadap parameter X_3 yaitu variabel jumlah penduduk miskin

Dengan tabel 10 % diperoleh t tabel sebesar -1,706 dan t statistik sebesar -3.814 sehingga H_0 ditolak. Artinya secara individu variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan negatif terhadap ketahanan fiskal daerah.

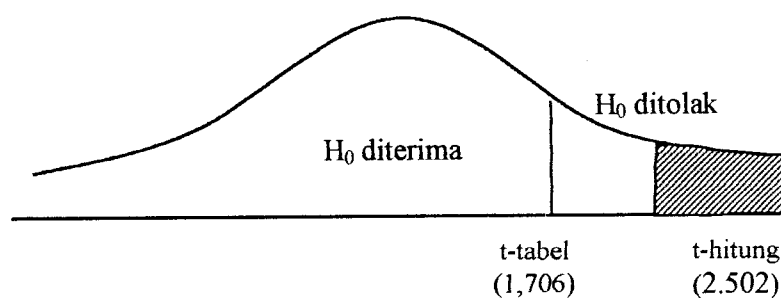
Gambar 5.7
Kurva uji t variabel jumlah penduduk miskin



4. Uji t terhadap parameter X_4 yaitu variabel PDRB

Dengan tabel 5 % diperoleh t tabel sebesar 1,706 dan t statistik sebesar 2.502 sehingga H_0 ditolak. Artinya secara individu variabel PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap ketahanan fiskal daerah.

Gambar 5.8
Kurva uji t variabel PDRB

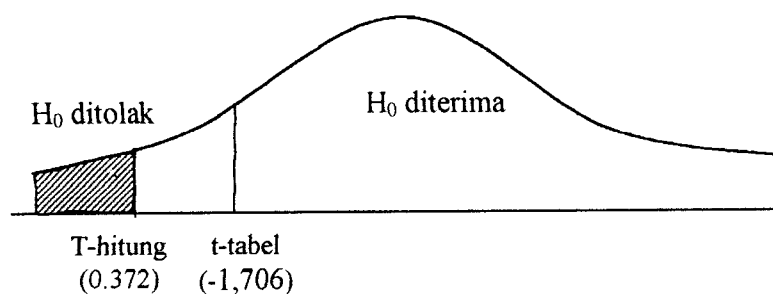


5. Sesudah Otonomi Daerah tahun 2002

1. Uji t terhadap parameter X_1 yaitu variabel Jumlah Penduduk.

Dengan tabel 5 % diperoleh t tabel sebesar 1,706 dan t statistik sebesar 0.372 sehingga H_0 diterima. Artinya secara individu variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan fiskal daerah.

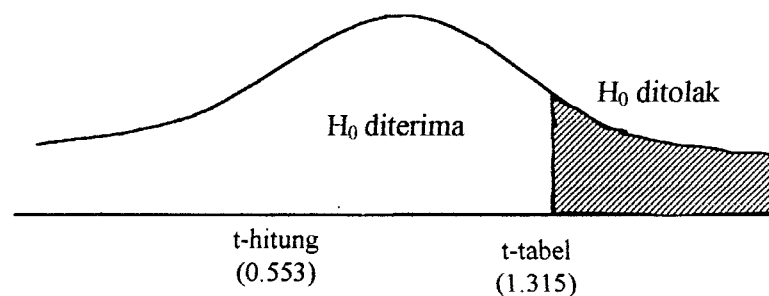
Gambar 5.9
Kurva uji t variabel jumlah penduduk



2. Uji t terhadap parameter X_2 yaitu variabel luas daerah

Dengan tabel 5 % diperoleh t tabel sebesar 1.706 dan t statistik sebesar 0.553 sehingga H_0 diterima. Artinya secara individu variabel luas daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan fiskal daerah

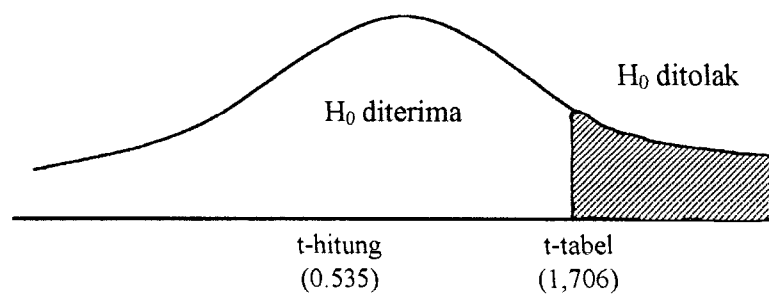
Gambar 5.10
Kurva uji t variabel luas daerah



3. Uji t terhadap parameter X_3 yaitu variabel jumlah penduduk miskin

Dengan tabel 10 % diperoleh t tabel sebesar 1,706 dan t statistik sebesar 0.535 sehingga H_0 diterima. Artinya secara individu variabel jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan fiskal daerah.

Gambar 5.11
Kurva uji t variabel jumlah penduduk miskin

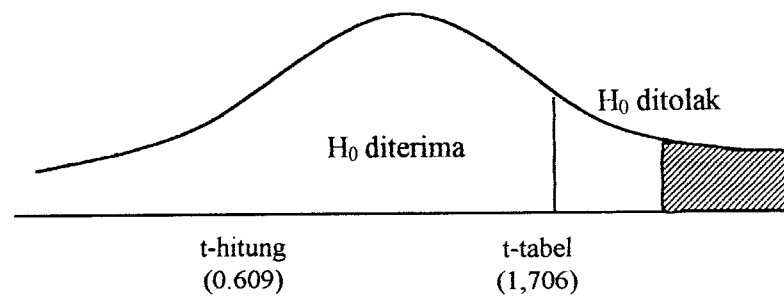


4. Uji t terhadap parameter X_4 yaitu variabel PDRB

Dengan tabel 5 % diperoleh t tabel sebesar 1,706 dan t statistik sebesar 0.609 sehingga H_0 ditolak. Artinya secara individu variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan fiskal daerah

Gambar 5.12

Kurva uji t variabel PDRB



5.2 Pengujian Asumsi Klasik

5.2.1 Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah variabel pengganggu yang saling berurutan sehingga terjadi korelasi serial. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan test Durbin-Watson dengan cara membandingkan nilai Durbin-Watson statistik hasil perhitungan dengan Durbin-Watson tabel.

$$DI = 0.941 \quad 4-du = 3.059$$

$$Du = 1.511 \quad 4-di = 2.489$$

Tabel 5.4
Nilai DW stat

Tahun	DW stat	Keterangan
1996	1.303	Daerah keragu-raguan
2000	1.591	Non autokorelasi
2002	2.035	Non autokorelasi

Dari nilai DW stat masing-masing tahun estimasi dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 1996 berada pada daerah keragu-raguan sedangkan tahun 2000 dan tahun 2002 berada pada daerah non autokorelasi

5.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah dimana terdapat korelasi diantara variabel-variabel independen yang satu dengan yang lainnya sehingga bila nilai koefisien korelasi dari variabel independen mendekati atau sama dengan satu maka terdapat korelasi sempurna (*perfect multicollinearity*). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas bisa dengan menggunakan nilai *tolerance* dan VIF. Indikasi terjadinya multikolinieritas jika nilai VIF > 10.

Tabel 5.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Tahun	1996		2000		2002	
	TOL	VIF	TOL	VIF	TOL	VIF
LOG X1	0.091	10.986*	0.056	16.971*	0.034	29.284*
LOGX2	0.769	1.301	0.755	1.324	0.740	1.351
LOGX3	0.088	11.400*	0.160	6.249	0.113	8.865
LOG X4	0.757	1.321	0.131	7.640	0.078	12.791*

Keterangan : *) terkena multikolinier

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk semua pengujian variabel penjelas, masing-masing tahun estimasi maka dapat disimpulkan pada tahun 1996 terdapat dua variabel independen yang terkena multikolinearitas, pada tahun 2000 terdapat satu variabel independen yang terkena multikolinearitas. Dan yang terakhir pada tahun 2002 terdapat dua variabel independen yang terkena multikolinearitas

5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Artinya setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang melatar belakangnya tidak terangkum dalam spesifikasi model. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dijumpai dalam data silang daripada runtun waktu, maupun juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata-rata (Kuncoro, 2001).

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode *rank sparman* yang terdapat pada SPSS.

Tabel 5.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tahun	1996		2000		2002	
Variabel	Correlation coefficient	Sig. (2-tailed)	Correlation Coefficient	Sig. (2-tailed)	Correlation coefficient	Sig. (2-tailed)
LOG X1	-0.132	0.559	-0.094	0.670	-0.188	0.328
LOGX2	0.180	0.422	0.102	0.644	-0.097	0.617
LOGX3	-0.234	0.294	-0.125	0.571	-0.218	0.257
LOG X4	0.180	0.422	-0.037	0.868	-0.132	0.495

Berdasarkan uji *rank spearman* didapatkan nilai probabilitas atau *sigfificant (2-tailed)* pada semua estimasi adalah lebih kecil daripada 0,05. sehingga dapat dikatakan model ini bebas dari gejala heteroskedastisitas

5.3 Pembahasan Estimasi

Dari hasil estimasi maupun uji asumsi klasik yang telah dilakukan baik secara individu maupun secara serentak menunjukkan, semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini dapat di analisis dan dijelaskan.

A. Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1996

1. Pendugaan terhadap nilai koefisien regresi untuk X_1 yaitu jumlah penduduk. Tanda parameter koefisien regresi untuk X_1 positif dengan nilai 0.617 , artinya setiap kenaikan jumlah penduduk bertambah 1% maka akan menyebabkan kenaikan fiskal daerah sebesar 0.617 %, *ceteris paribus*.
2. Pendugaan terhadap nilai koefisien regresi untuk X_2 yaitu luas area . Tanda parameter koefisien regresi untuk X_2 negatif dengan nilai -0.261, artinya setiap kenaikan luas area bertambah 1% maka akan menyebabkan penurunan fiskal daerah sebesar 0.261 %.
3. Pendugaan terhadap nilai koefisien regresi untuk X_3 yaitu jumlah penduduk miskin. Tanda parameter koefisien regresi untuk X_3 negatif dengan nilai - 0.403, artinya setiap kenaikan jumlah penduduk miskin

bertambah 1% maka akan menyebabkan penurunan fiskal daerah sebesar 0.403 %.

4. Pendugaan terhadap nilai koefisien regresi untuk X_4 yaitu PDRB. Tanda parameter koefisien regresi untuk X_4 positif dengan nilai 0.694 , artinya setiap kenaikan PDRB bertambah 1% maka akan menyebabkan kenaikan fiskal daerah sebesar 0.694 %.

B. Masa Transisi Tahun 2000

1. Pendugaan terhadap nilai koefisien regresi untuk X_1 yaitu jumlah penduduk. Tanda parameter koefisien regresi untuk X_1 positif dengan nilai 0.379 , artinya setiap kenaikan jumlah penduduk bertambah 1% maka akan menyebabkan kenaikan ketahanan fiskal daerah sebesar 0.379 %., *ceteris paribus*.
2. Pendugaan terhadap nilai koefisien regresi untuk X_2 yaitu luas area Tanda parameter koefisien regresi untuk X_2 negatif dengan nilai -0.309 , artinya setiap kenaikan luas area bertambah 1% maka akan menyebabkan penurunan ketahanan fiskal daerah sebesar 0.309%.
3. Pendugaan terhadap nilai koefisien regresi untuk X_3 yaitu jumlah penduduk miskin. Tanda parameter koefisien regresi untuk X_3 negatif dengan nilai -0.553 , artinya setiap kenaikan jumlah penduduk miskin bertambah 1% maka akan menyebabkan penurunan ketahanan fiskal daerah sebesar 0.553 %.

- 4 Pendugaan terhadap nilai koefisien regresi untuk X_4 yaitu PDRB. Tanda parameter koefisien regresi untuk X_4 positif dengan nilai 0.432, artinya setiap kenaikan PDRB bertambah 1% maka akan menyebabkan kenaikan ketahanan fiskal daerah sebesar 0.432 %.

C. Sesudah Otonomi Daerah Tahun 2002

Pada saat diberlakukannya otonomi daerah yakni tahun 2002, ternyata semua variabel independen (jumlah penduduk, luas area, jumlah penduduk miskin dan PDRB) tidak memiliki nilai t-statistik yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa diberlakukannya daerah otonomi ketahanan fiskal daerah bukan lagi dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas area, jumlah penduduk miskin dan PDRB, tetapi dipengaruhi oleh faktor yang lainnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

6.1 kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan di atas sebelumnya, berkaitan dengan ketahanan fiskal daerah di seluruh Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Melihat hasil SPSS yang digunakan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapat cukup valid dalam menjelaskan variabel ketahanan fiskal daerah. Pengujian terhadap koefisien determinan (R-Square) yang dilakukan baik untuk tahun 1996, 2000, dan 2002, menghasilkan nilai yaitu 65.2%, 80%, 25,7%, uji F yang dilakukan untuk tahun 1996, 2000 dan 2002 adalah :
 - Untuk tahun 1996 dan 2000 masing-masing 8.886, dan 17.945, sedangkan nilai F tabel adalah 2.78 menunjukkan signifikan pada alpha 5% karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, hal ini berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
 - Untuk tahun 2002 F_{hitung} 2.079, sedangkan F_{tabel} 2.78, signifikan pada estimasi 5% karena $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal ini berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. Dari keempat variabel yang digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi ketahanan fiskal daerah :

- Variabel Jumlah Penduduk untuk tahun 1996, dan 2000, koefisien regresi positif dengan nilai 0.617 dan 0.379 terhadap ketahanan fiskal daerah. Ini berarti semakin bertambah jumlah penduduk maka akan semakin bertambah derajat ketahanan fiskal daerah, untuk tahun 2002 jumlah penduduk tidak mempengaruhi ketahanan fiskal daerah.
 - Variabel Luas Daerah untuk tahun 1996 dan 2000 koefisien regresi negatif dengan nilai -2.61 dan -0.309 terhadap ketahanan fiskal daerah. Ini berarti semakin bertambah luas daerah maka akan semakin turun derajat ketahanan fiskal daerah, untuk tahun 2002 luas area tidak mempengaruhi ketahanan fiskal daerah.
 - Variabel Jumlah Penduduk Miskin untuk tahun 1996 dan 2000 koefisien regresi negatif dengan nilai -0.403 dan -0.553 terhadap ketahanan fiskal daerah. Ini berarti semakin bertambah jumlah penduduk miskin maka akan semakin turun derajat ketahanan fiskal daerah, untuk tahun 2002 jumlah penduduk miskin tidak mempengaruhi ketahanan fiskal daerah.
 - Variabel PDRB untuk tahun 1996 dan 2000 koefisien regresi positif dengan nilai 0.694 dan 0.432 terhadap ketahanan fiskal daerah. Ini berarti semakin bertambah PDRB maka akan semakin bertambah derajat ketahanan fiskal daerah, untuk tahun 2002 PDRB tidak mempengaruhi ketahanan fiskal daerah.
3. Pengujian pelanggaran terhadap asumsi klasik yang dilakukan ditemukan adanya multikolonioritas yaitu pada tahun 1996 terdapat dua variabel independen pada jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin, untuk tahun

2000 terdapat satu variabel independen yaitu pada jumlah penduduk, untuk tahun 2002 terdapat dua variabel independen yaitu pada jumlah penduduk dan PDRB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian tahun 1996, 2000, dan 2002 tidak terbebas dari asumsi klasik.

6.2 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka berkaitan dengan ketahanan fiskal daerah, implikasi yang dapat dikemukakan disini adalah :

1. Pemerataan fiskal antar daerah-daerah serta kesenjangan kemampuan fiskal antar daerah relatif masih besar.
2. Pemerintah daerah kurang memperhatikan perkembangan dan laju pertumbuhan penduduk miskin, sehingga permasalahan daerah semakin banyak dan pengeluaran pemerintah dalam dana alokasi umum akan semakin besar dan akan mempengaruhi APBD.
3. Kurangnya pengelolaan sumber daya alam yang ada didaerah sehingga masih besarnya bantuan dari pemerintah pusat.
4. Masih adanya faktor lain diluar jumlah penduduk, luas area, jumlah penduduk miskin, PDRB, yang mempengaruhi derajat kemandirian fiskal daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik, *Statistik Indonesia*, Yogyakarta, 1996, 2000, 2002
- Biro pusat Statistik, *Statistik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta 1996, 2000, 2002
- Boediono, *Ekonomi Mikro*, BPFE, Yogyakarta, 1991
- Djojohadikusuma, Sumitro, *Teori Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan*, ISEI, Gramedia, Jakarta, 1987
- Elmi, Bachrul, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2002
- Gujarati, Damodar, *Ekonometrika Dasar*, Terjemahan Zumarno Zein, Erlangga, Jakarta, 1991
- Hakim, Adul, *Ekonomi Pembangunan*, Ekonesia, Yogyakarta, 2002
- Kuncoro, Mudrajat, *Daesentralisasi Fiskal Di Indonesia*, Prima, No. 4, Tahun XXIV, Jakarta, 1995
- Mangkusubroto, Guritno, *Ekonomio Publik*, BPFE UGM, Yogyakarta, Tahun 2001
- Radianto, Elia, *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II*, Studi Di Maluku, Prisma, No 3, Tahun XXIV, Jakarta, 1997
- Saragih, Panglima, Juli, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 2003
- Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002
- Sis Setyoningsih, *Analisa Struktur Perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Bulletin Bkonomi, 2001
- Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Susilo, Hadi, *Ekonomi Indonesia*, RGP, Jakarta, Tahun 2000

Yunus, Hadi, *Struktur Tata Ruang Kota*, Pustaka Pelajar, Tahun 2000

LAMPIRAN

Data tahun 1996

No	Daerah	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
1	Dista Aceh	3 847	55 390	491.8	6213757
2	Sumatera Utara	11115	71 680	1 0475.7	23273774
3	Sumatera Barat	4 323	42 898	426.2	7606970
4	Riau	3 900	94 561	496.7	7853087
5	Jambi	2 370	53 436	354.5	3045829
6	Sumatera Selatan	7 208	109 254	1 154.4	11611903
7	Kep. Bangka Belitung			-	
8	Bengkulu	1 409	19 789	236.9	1726349
9	Lampung	6 658	35 385	1712.2	6912303
10	DKI Jakarta	9 113	664	215.8	66201775
11	Jawa Barat	39 207	43 177	4358.8	64716986
12	Banten			-	
13	Jawa Tengah	29 653	32 549	6 417.6	39858797
14	DI Yogyakarta	2 917	3 186	537.8	5111563
15	Jawa Timur	33 844	47 923	7 503.3	61752871
16	Bali	2 896	5 633	227.0	7141433
17	Kalimantan Barat	3 636	146 807	885.7	6712361
18	Kalimantan Tengah	1 627	153 564	221.8	4036152
19	Kalimantan Selatan	2 893	36 535	247.5	5897186
20	Kalimantan Timur	2 314	210 985	227.7	10915544
21	Sulawesi Utara	2 649	27 488	476.2	3574695
22	Gorontalo			-	
23	Sulawesi Tengah	1 938	63 689	435.4	2212649
24	Sulawesi Selatan	7 558	62 483	1 268.3	9465267
25	Sulawesi Tenggara	1 587	38 140	466.4	1561002
26	Nusa Tenggara Barat	3 646	20 153	1 169.3	3195295
27	Nusa Tenggara Timur	3 577	47 349	1395.1	2679099
28	Maluku	2 087	77 871	934.7	2955004
29	Maluku Utara			-	
30	Papua	1 943	421 981	830.3	6784555
	Indonesia	194 755	1 937 179	34 516.6	373667433

Keterangan : X₁ = Jumlah Penduduk (000)

X₂ = Luas Area (Km²)

X₃ = Jumlah Penduduk Miskin (000)

X₄ = PDRB (Juta)

Data tahun 2000

No	Daerah	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
1	Dista Aceh	3 929	55390	-	6099034
2	Sumatera Utara	11 642	71680	1491.8	23843539
3	Sumatera Barat	4 249	42898	482.50	7868238
4	Riau	4 948	94561	485.60	9649876
5	Jambi	2 407	53436	504.90	3059776
6	Sumatera Selatan	6 899	109254	1338.00	9911600
7	Kep. Bangka Belitung	900		-	1872602
8	Bengkulu	1 564	19789	249	1744250
9	Lampung	6 731	35385	2017.80	7104008
10	DKI Jakarta	8 361	664	416.10	59694419
11	Jawa Barat	31 223	43177	6658.40	51402291
12	Banten	8 098		-	16540147
13	Jawa Tengah	31 223	32549	6513.60	3823267
14	DI Yogyakarta	3 121	3186	1035.80	5017709
15	Jawa Timur	34 766	47923	7845.40	56691767
16	Bali	3 150	5633	176.80	7521841
17	Kalimantan Barat	4 016	146807	1095.00	7274000
18	Kalimantan Tengah	1 855	153564	213.70	4092515
19	Kalimantan Selatan	2 984	36535	385.30	6335173
20	Kalimantan Timur	2 452	2109985	393.60	11966186
21	Sulawesi Utara	2 001	27488	365.90	3220688
22	Gorontalo	833		-	918614
23	Sulawesi Tengah	2 176	63689	503.20	2383700
24	Sulawesi Selatan	8 051	62483	1198.00	10066907
25	Sulawesi Tenggara	1 820	38140	419.20	1672193
26	Nusa Tenggara Barat	4 009	20153	1071.50	4377225
27	Nusa Tenggara Timur	3 823	47349	1425.90	2952372
28	Maluku	1 163	77871	-	1290762
29	Maluku Utara	732		-	858442
30	Papua	2 214	421981	970.90	8139284
	Indonesia	205 843	1922570	37256.9²⁾	371801833

Keterangan : X₁ = Jumlah Penduduk (000)

X₂ = Luas Area (Km²)

X₃ = Jumlah Penduduk Miskin (000)

X₄ = PDRB (Juta)

Data tahun 2002

No	Daerah	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
1	Dista Aceh	4 041	51 937	1199.9	6193906
2	Sumatera Utara	11 942	73 587	1883.9	24771481
3	Sumatera Barat	4 298	42 899	496.4	8153962
4	Riau	5 383	94 560	722.4	10146823
5	Jambi	2 949	53 437	326.9	3132295
6	Sumatera Selatan	7 226	93 083	1600.6	10231486
7	Kep. Bangka Belitung	917	16 171	106.2	1976771
8	Bengkulu	1 656	19 789	372.4	1814479
9	Lampung	6 889	35 384	1650.6	7363019
10	DKI Jakarta	8 382	664	286.9	61865971
11	Jawa Barat	37 157	34 597	4938.2	53852219
12	Banten	8619	8 651	786.7	17340654
13	Jawa Tengah	31 786	32 549	7308.3	39443838
14	DI Yogyakarta	3 163	3 186	635.6	5182544
15	Jawa Timur	35 225	47 922	7701.2	58682151
16	Bali	3 230	5 633	221.8	7777071
17	Kalimantan Barat	4 198	146 807	644.2	7409948
18	Kalimantan Tengah	1 965	153 564	231.4	4203919
19	Kalimantan Selatan	3 068	43 546	259.8	6579063
20	Kalimantan Timur	2 589	230 277	313	12856740
21	Sulawesi Utara	2 052	15 273	229.3	3357569
22	Gorontalo	859	12 215	274.7	968046
23	Sulawesi Tengah	2 287	63 678	564.6	2507463
24	Sulawesi Selatan	8 284	62 365	1309.2	10566455
25	Sulawesi Tenggara	1 935	38 140	463.8	1766340
26	Nusa Tenggara Barat	4 152	20 153	1145.8	4770688
27	Nusa Tenggara Timur	3 945	47 351	1206.5	3103059
28	Maluku	1 165	46 975	418.8	1269673
29	Maluku Utara	739	30 895	110.1	872225
30	Papua	2 356	365 466	984.7	8014332
	Indonesia	212 003	1 890 754	38 394.0	386174190

Keterangan : X₁ = Jumlah Penduduk (000)

X₂ = Luas Area (Km²)

X₃ = Jumlah Penduduk Miskin (000)

X₄ = PDRB (Juta)

OLAH DATA SPSS TAHUN 1996

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
LOG.Y PAD/APBD	-1,1507721	,23850650	24
LOG.X1 Jumlah Penduduk	3,6419312	,40929608	24
LOG.X2 Luas Area	4,6513411	,41086593	24
LOG.X3 Jumlah Penduduk Miskin	5,6894495	,44766218	24
LOG.X4 PDRB (tanpa migas)	6,2829334	,15985784	24

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LOG.X4 PDRB (tanpa migas), LOG.X1 Jumlah Penduduk, LOG.X2 Luas Area, LOG.X3 Jumlah Penduduk Miskin		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: LOG.Y PAD/APBD

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.807 ^a	.652	.578	1,5487902	1,303

a. Predictors: (Constant), LOG.X4 PDRB (tanpa migas), LOG.X1 Jumlah Penduduk, LOG.X2 Luas Area, LOG.X3 Jumlah Penduduk Miskin

b. Dependent Variable: LOG.Y PAD/APBD

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.853	4	,213	8,886	,000 ^a
	Residual	,456	19	,024		
	Total	1,308	23			

a. Predictors: (Constant), LOG.X4 PDRB (tanpa migas), LOG.X1 Jumlah Penduduk, LOG.X2 Luas Area, LOG.X3 Jumlah Penduduk Miskin

b. Dependent Variable: LOG.Y PAD/APBD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	-4.253	1.605		-2.650
	LOG.X1 Jumlah Penduduk	.617	.262	1.060	2.361
	LOG.X2 Luas Area	-.261	.090	-.450	-2.912
	LOG.X3 Jumlah Penduduk Miskin	-.403	.244	-.756	-1.653
	LOG.X4 PDRB (tanpa migas)	.694	.232	.465	2.987

Coefficients^a

Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.016		
	LOG X1 Jumlah Penduduk	.029	.691	10.986
	LOG X2 Luas Area	.009	.769	1.301
	LOG X3 Jumlah Penduduk Miskin	.115	.688	11.400
	LOG X4 PDRB (tanpa migas)	.008	.787	1.321

a. Dependent Variable: LOG Y PAD APBD

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-1.5133353	-.6629828	-1.1507721	1.9253462	24
Residual	-.3808794	.2167750	.0068000	1.076850	24
Std. Predicted Value	-1.883	2.534	0.00	1.000	24
Std. Residual	-1.489	1.400	0.00	1.000	24

a. Dependent Variable: LOG Y PAD APBD

Nonparametric Correlations

Correlations

				E
Spearman's rho	LOG.X1	Jumlah Penduduk	Correlations Coefficient	-.094
			Sig. (2-tailed)	.670
			N	23
	LOG.X2	Luas Area	Correlations Coefficient	.102
			Sig. (2-tailed)	.644
			N	23
	LOG.X3	Jumlah Penduduk Miskin	Correlations Coefficient	-.125
			Sig. (2-tailed)	.571
			N	23
	LOG.X4	PDRB (tanpa migas)	Correlation Coefficient	-.037
			Sig. (2-tailed)	.868
			N	23
E			Correlation Coefficient	1.000
			Sig. (2-tailed)	
			N	23

OLAH DATA SPSS TAHUN 2000

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
LOG.Y PAD/APBD	-1.1530637	.25236780	23
LOG.X1 Jumlah Penduduk	3.6645399	.40845868	23
LOG.X2 Luas Area	4.6792466	.46452349	23
LOG.X3 Jumlah Penduduk Miskin	2.9372041	.45955250	23
LOG.X4 PDRB (tanpa migas)	6.8671000	.42598618	23

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LOG.X4 PDRB (tanpa migas) LOG.X2 Luas Area LOG.X3 Jumlah Penduduk Miskin LOG.X1 Jumlah Penduduk ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: LOG.Y PAD/APBD

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.894 ^a	.800	.755	1.2492560	1.591

a. Predictors: (Constant), LOG.X4 PDRB (tanpa migas), LOG.X2 Luas Area, LOG.X3 Jumlah Penduduk Miskin, LOG.X1 Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: LOG.Y PAD/APBD

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.120	4	.280	17.945	.000 ^a
	Residual	.281	18	.016		
	Total	1.401	22			

a. Predictors: (Constant), LOG.X4 PDRB (tanpa migas), LOG.X2 Luas Area, LOG.X3 Jumlah Penduduk Miskin, LOG.X1 Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: LOG.Y PAD/APBD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
	(Constant)	-2.441	.833		-2.930
	LOG X1 Jumlah Penduduk	.379	.210	.013	1.812
	LOG X2 Luas Area	-.309	.660	-.509	-.467
	LOG X3 Jumlah Penduduk Miskin	-.553	.147	-.100	-3.751
	LOG X4 PDRB (tanpa impor)	.432	.173	.730	2.502

Coefficient^a

Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.000		
	LOG.X1 Jumlah Penduduk	.175	.751	1.331
	LOG.X2 Luas Area	.000	.788	1.271
	LOG.X3 Jumlah Penduduk Miskin	.001	.600	1.667
	LOG.X4 PDRB (tanpa migas)	.022	.131	7.640

a. Dependent Variable: LOG.Y PAD/APBD

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-1.5756090	-.5438063	-1.1530637	.22565599	23
Residual	-.2617295	.2378210	.0000000	.11299946	23
Std. Predicted Value	-1.873	2.700	.000	1.000	23
Std. Residual	-2.095	1.904	.000	.905	23

a. Dependent Variable: LOG.Y PAD/APBD

Nonparametric Correlations

Correlations

			E	
Spearman's rho	LOG.X1	Jumlah Penduduk	Correlation Coefficient	-.094
			Sig. (2-tailed)	.670
			N	23
	LOG.X2	Luas Area	Correlation Coefficient	.102
			Sig. (2-tailed)	.644
			N	23
	LOG.X3	Jumlah Penduduk	Correlation Coefficient	-.125
		Miskin	Sig. (2-tailed)	.571
			N	23
	LOG.X4	PDRB (tanpa migas)	Correlation Coefficient	-.037
			Sig. (2-tailed)	.868
			N	23
E			Correlation Coefficient	1.000
			Sig. (2-tailed)	.
			N	23

OLAH DATA SPSS TAHUN 2002

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
LOG.Y PAD/APBD	-1.1340918	.46323168	29
LOG.X1 Jumlah Penduduk	3.5874326	.44473931	29
LOG.X2 Luas Area	4.5991004	.45551050	29
LOG.X3 Jumlah Penduduk Miskin	2.8326492	.47620545	29
LOG.X4 PDRB (tanpa migas)	6.7825095	.48048141	29

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LOG.X4 PDRB (tanpa migas), LOG.X2 Luas Area, LOG.X3 Jumlah Penduduk Miskin, LOG.X1 Jumlah Penduduk ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: LOG.Y PAD/APBD

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.507 ^a	.257	.134	.43118731	2.035

a. Predictors: (Constant), LOG.X4 PDRB (tanpa migas), LOG.X2 Luas Area, LOG.X3 Jumlah Penduduk Miskin, LOG.X1 Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: LOG.Y PAD/APBD

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.546	4	.387	2.079	.115 ^a
	Residual	4.462	24	.186		
	Total	6.008	28			

a. Predictors: (Constant), LOG.X4 PDRB (tanpa migas), LOG.X2 Luas Area, LOG.X3 Jumlah Penduduk Miskin, LOG.X1 Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: LOG.Y PAD/APBD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	-3.660	1.717		-2.131
	LOG.X1 Jumlah Penduduk	.368	.992	.354	.372
	LOG.X2 Luas Area	-.115	.208	-.113	-.553
	LOG.X3 Jumlah Penduduk Miskin	-.273	.509	-.280	-.535
	LOG.X4 PDRB (tanpa migas)	.370	.607	.383	.609

Coefficients^a

Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.044		
	LOG.X1 Jumlah Penduduk	.713	.034	29.284
	LOG.X2 Luas Area	.585	.740	1.351
	LOG.X3 Jumlah Penduduk Miskin	.597	.113	8.865
	LOG.X4 PDRB (tanpa migas)	.548	.078	12.791

a. Dependent Variable: LOG.Y PAD/APBD

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	LOG.Y PAD/APBD
37	-3.376	-2.73497

a. Dependent Variable: LOG.Y PAD/APBD

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-1.5278097	-.6494536	-1.1340918	.23499246	29
Residual	-1.4556921	.6422122	.0000000	.39920188	29
Std. Predicted Value	-1.675	2.062	.000	1.000	29
Std. Residual	-3.376	1.489	.000	.926	29

a. Dependent Variable: LOG.Y PAD/APBD

Nonparametric Correlations

Correlations

			1	
Spearman's rho	LOG X1	Jumlah Penduduk	Correlations Coefficient	-.188
			Sig. (2-tailed)	.328
			N	29
LOG X2	Luas Area		Correlations Coefficient	-.097
			Sig. (2-tailed)	.437
			N	29
LOG X3	Jumlah Penduduk	Miskin	Correlations Coefficient	-.218
			Sig. (2-tailed)	.257
			N	29
LOG X4	PDRB (tanpa migas)		Correlation Coefficient	-.132
			Sig. (2-tailed)	.495
			N	29
E			Correlation Coefficient	1.000
			Sig. (2-Tailed)	
			N	29